

Melihat Persepsi Korupsi Masyarakat: Analisis Kolektivisme dan Gaya Pengambilan Keputusan

Ei Syafira Saragih¹ dan Yansa Alif Mulya²

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang¹

Universitas Indonesia²

¹ elsyssaragih@gmail.com ² yansa.alif@ui.ac.id

ABSTRAK

Kasus korupsi pada masyarakat yang bersifat kolektif dapat menjadi pemicu terjadinya tindakan kekerasan didalam interaksi masyarakat. Berdasarkan data dari Transparency Internasional for Indonesia (2023) dan Badan Pusat Statistik Indonesia (2024), menyatakan bahwa CPI atau Indeks Persepsi Korupsi negara Indonesia turun sebesar 0,07 poin dari 3,96 di 2023 menjadi 3,89 pada 2024. Praktik korupsi di Indonesia sendiri sudah mengakar, sistematis, kolektif dan berevolusi bentuk dan rupanya. Pada penelitian ini, peneliti berusaha untuk melihat persepsi korupsi masyarakat Indonesia pada saat ini dengan pengaruh budaya kolektif dan dimediasi oleh gaya pengambilan keputusan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif model mediasi (N = 120) dengan menyebarkan survei online. Analisis menggunakan tiga alat ukur berdasarkan CVS Scale dari Yoo (2016), GDMS oleh Baiocco, dkk (2009), dan CPS Scale dari Vieire, dkk (2022). Variabel kolektif ($\beta = 0.204$, $F(1, 118) = 47.93$, $p < 0.05$), persepsi dan tipe pengambilan ($\beta = 0.853$, $F(1, 118) = 85.15$, $p < 0.05$) dapat memprediksi satu sama lain. Gaya pengambilan keputusan ($\beta = .137$) mampu memediasi hubungan antara kolektif ($\beta = .132$) dengan persepsi korupsi. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, kolektif dan gaya pengambilan keputusan hanya mampu menjelaskan 45,9% dari persepsi tentang korupsi. Sehingga, masih banyak faktor yang mendorong praktik korupsi di Indonesia yang dapat dibahas pada penelitian selanjutnya.

Kata kunci: Korupsi; Persepsi; Kolektif; Gaya pengambilan keputusan; Indonesia

ABSTRACT

Cases of corruption in society that are collective in nature can trigger acts of violence in social interactions. Based on data from Transparency International for Indonesia (2023) and the Central Statistics Agency of Indonesia (2024), it states that the CPI or Corruption Perception Index of Indonesia fell by 0.07 points from 3.96 in 2023 to 3.89 in 2024. The practice of corruption in Indonesia itself is deep-rooted, systematic, collective and has evolved in form and appearance. In this study, researchers attempted to see the perception of corruption in Indonesian society at this time with the influence of collective culture and mediated by decision-making style. This study uses a quantitative approach to the mediation model (N = 120) by distributing online surveys. The analysis uses three measuring instruments based on the CVS Scale from Yoo (2016), GDMS by Baiocco, et al. (2009), and the CPS Scale from Vieire, et al. (2022). Collective variables ($\beta = 0.204$, $F(1, 118) = 47.93$, $p < 0.05$), perception and decision-making type ($\beta = 0.853$, $F(1, 118) = 85.15$, $p < 0.05$) can predict each other. Decision-making style ($\beta = .137$) is able to mediate the relationship between collective ($\beta = .132$) and perception of corruption. Based on the analysis that has been done, collective and decision-making style are only able to explain 45.9% of the perception of corruption. Thus, there are still many factors that encourage corrupt practices in Indonesia that can be discussed in further research.

Keywords: Corruption; Perception; Collective; Decision-making style

PENDAHULUAN

Indonesia telah berjuang untuk melawan korupsi bahkan sejak zaman kolonial Belanda (Shallahudin, 2022). Namun seiring dengan upaya perjuangan melawan korupsi ini, menurut Transparency Internasional mengatakan bahwa skor CPI (Corruption Perception Indeks) Indonesia 2023 masih stagnan di 34 dari 100 sejak tahun 2024 (International, 2024). Penemuan ini juga diperkuat oleh hasil survei dari BPS (Badan Pusat Statistik) yang menyatakan bahwa IPAK (Indeks Perilaku Anti Korupsi) di Indonesia menurun dari 3,92 pada 2023 ke 3,85 di 2024 (Statistik, 2024).

Angka tersebut mengatakan bahwa tingkat pemahaman dan persepsi masyarakat Indonesia

terhadap tindakan anti-korupsi semakin menurun dari tahun 2023 ke 2024. Meski data tersebut hanya terselang satu tahun, namun ketika melihat bagaimana Indonesia “terseok-seok” dalam melawan korupsi sejak puluhan tahun dan melihat bentuk korupsi yang telah berevolusi (Bicchieri & Rovelli, 1994) tentunya hal ini mengkhawatirkan. Bagaimana bisa negara dapat bertahan jika masyarakatnya mulai melihat korupsi sebagai hal yang biasa?

Penelitian ini pula teretus melalui fenomena yang ada di sekitar peneliti, baik *online* maupun *offline*. “Nggak papa pemerintah korupsi, yang penting kita hidup masih baik-baik saja.”, “Nggak papa pemerintah korupsi, yang penting jembatannya jadi. Soalnya kan korupsi itu pasti.”.

Setidaknya itulah yang mereka katakan ketika disodorkan berita korupsi. Pernyataan di atas memang kontradiktif dan tidak logis, namun korupsi di Indonesia memang unik dan mengakar sehingga membuatnya susah diberantas.

Korupsi

Pada UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No.20 Tahun 2001 mendefinisikan korupsi sebagai tindakan melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri atau orang lain, atau korupsi juga bisa membuat kerugian terhadap negara ataupun perekonomiannya.

Menurut Wang Huning dan Huang Bai Lian korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik dan merupakan sebuah pertukaran yang tidak adil(Liu, 2016). Menambahkan penjelasan tersebut, menurut Masuki, korupsi adalah kejahatan terencana dan penuh perhitungan oleh orang-orang yang terpelajar (dalam Salama, 2014). Sehingga bisa disimpulkan bahwa korupsi adalah kegiatan kejahatan terstruktur dengan menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri atau orang lain dan menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakatnya.

Meski dapat menimbulkan kerugian bagi negara, nyatanya korupsi di Indonesia tumbuh subur dalam lembaga pemerintahan(Prabowo & Copoer, 2017). Hal ini dikarenakan korupsi di Indonesia sering dilakukan secara kolektif (Sahama, Shofia, Reiza , & Riyono, 2019). Motifnya tidak hanya untuk memperkaya diri, namun juga sebagai solidaritas kelompok dan hubungan pertemanan yang tentunya didukung oleh sistem yang ada (Salam, 2014). Korupsi akhirnya menjadi kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat (Sahama, Shofia, Reiza, & Riyono, 2019) dan dilihat sebagai sesuatu yang *banal* atau wajar (Salama, 2014).

Psychological Pathway to Fraud

Berubahnya persepsi masyarakat terhadap korupsi di atas tentunya mengkhawatirkan, karena menurut teori *Psychological Pathways to Fraud* , elemen teori dalam tindakan penipuan (salah satu bentuknya adalah korupsi) merupakan kurangnya kesadaran terhadap kecurangan, proses pembuatan keputusan apakah akan melakukan kecurangan atau tidak dan rasionalisasi intuisi dalam nilai-nilai moral dan intuisi yang ada dalam diri mereka (Murphy & Dacin, 2011).

Berdasarkan teori di atas, peneliti merumuskan tiga variabel untuk diteliti. Persepsi korupsi sebagai variabel *dependen*, kolektivitas sebagai variabel *independen* dan gaya pengambilan keputusan sebagai variabel mediator.

Persepsi Korupsi

Memahami persepsi korupsi pada masyarakat penting adanya karena hal tersebut dapat memengaruhi kebiasaan perilaku publik dan kebijakan dan perilaku dari pemerintah itu sendiri (Vieira, Visentini, & Cunha, 2022). Oleh karena itu, peneliti memasukkan variabel persepsi korupsi untuk melihat apakah responden dapat melihat, mengetahui dan bahkan pernah melakukan korupsi melalui alat ukur *CPS* atau *Corruption Perception Scale* (Vieira, Visentini, & Cunha, 2022). Persepsi korupsi ini mengukur 5 dimensi pada level individual di antaranya:

1. Dimensi pengetahuan, melihat apa yang seseorang/masyarakat tahu tentang korupsi.
2. Dimensi perilaku, bagaimana seseorang/masyarakat berperilaku terhadap tindakan korupsi.
3. Dimensi refleksi, mengukur bagaimana seseorang/masyarakat menyadari dampak korupsi bagi kehidupan mereka dan negara.
4. Dimensi kontrol, menganalisis bagaimana seseorang/masyarakat merasakan usaha memerangi korupsi di negara mereka oleh pemerintah.
5. Dimensi sikap, mendefinisikan bagaimana seseorang/masyarakat berpikir atau berhadapan dengan tindakan korupsi.

Diharapkan melalui definisi dan alat ukur ini, peneliti dapat menjabarkan kondisi persepsi responden dan melihat bagaimana hubungan atau dampaknya pada variabel lain.

Gaya Pengambilan Keputusan

Korupsi di Indonesia tentunya sangat kompleks, namun tidak dapat dipungkiri bahwa ia merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan oleh para pelakunya (Prabowo, 2014). Berdasarkan hal tersebut, peneliti berusaha melihat apakah gaya pengambilan keputusan dapat memengaruhi perilaku korupsi melalui *GDMS* (*General Decision Making Scale*). Pada skala *GDMS*, gaya pengambilan keputusan didefinisikan sebagai pola kebiasaan yang telah dipelajari oleh seseorang ketika dihadapkan pada suatu masalah (Scott & Bruce , 1995).

Pada skala *GDMS*, gaya pengambilan keputusan dibagi menjadi 5 tipe antara lain (Scott & Bruce , 1995):

1. Rasional, terdefiniskan sebagai gaya pemikiran berdasarkan pencarian fakta dan analisa yang logis.
2. Intuitif, berdasarkan pada intuisi dan perasaan semata.

3. *Dependen* atau bergantung, biasanya mencari nasihat atau arahan dari orang lain ketika dihadapkan pada suatu masalah.
4. *Avoidant* atau menghindari, berusaha untuk menghindari pengambilan keputusan.
5. Spontan, mengambil keputusan secara tiba-tiba atau impulsif.

Berdasarkan teori yang ditarik dari permasalahan di atas, diharapkan variabel gaya pengambilan keputusan mampu menjadi mediator.

Kolektivitas

Melihat sifat korupsi yang “gotong royong” di Indonesia, peneliti memasukkan variabel kolektivitas sebagai variabel independen sebagai traits yang sulit berubah pada individu. Korupsi dan kolektivitas sendiri telah diteliti sebelumnya dan dijelaskan bahwa grup yang kolektif dan mempunyai nilai moral yang kuat dapat mencegah terjadinya tindakan korupsi, begitu juga sebaliknya (Abraham & Pane, 2014).

Variabel kolektivitas diambil dari skala CVS yang juga dapat mengukur kolektivitas dalam level individual (Yoo & Shin, 2016). Beberapa aitem dari skala CVS antara lain:

1. Individu seharusnya mengorbankan minat/kebutuhan dirinya untuk kepentingan kelompok (termasuk di sekolah atau tempat kerja).
2. Seseorang seharusnya tetap bersama dengan kelompoknya meskipun melalui kesulitan.
3. Kesejahteraan kelompok lebih penting dibandingkan penghargaan untuk individu.
4. Keberhasilan kelompok lebih penting dibandingkan keberhasilan individu.
5. Individu seharusnya hanya mengejar tujuannya setelah mempertimbangkan kesejahteraan kelompok.
6. Loyalitas kelompok seharusnya lebih diutamakan, meskipun jika anggota kelompok mengalami penderitaan.

Berdasarkan definisi dan alat ukur ini, peneliti dapat melihat bagaimana kolektivisme dapat memengaruhi tindakan korupsi melalui mediator maupun langsung. Sehingga, perlu diteliti lebih jauh bagaimana hubungan antara persepsi masyarakat terhadap korupsi dengan budaya kolektif di masyarakat. Pada masyarakat dengan kehidupan kolektif serta perilaku korupsi yang cukup tinggi, tindakan yang bersifat kekerasan akan muncul pada interaksi masyarakat (Thomas & Louis, 2014). Salah satu factor yang menentukan interaksi antar variabel tersebut adalah gaya pengambilan keputusan.

METODE

Dalam mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan desain survei. Desain ini dirasa

sesuai dengan penelitian karena tidak membutuhkan perlakuan atau intervensi kepada partisipan. Desain survey banyak dilakukan untuk menganalisis model korelasi maupun regresi. Dalam penelitian ini, survey disebarakan menggunakan *google form* dengan aitem-aitem yang telah disediakan. Anggota populasi yang dianggap sesuai dengan kriteria berhak untuk mengisi. Anggota populasi yang dianggap sebagai partisipan adalah individu yang telah mengisi survey *online* hingga selesai (Creswell, 2012). Studi ini berusaha untuk menemukan hubungan antara beberapa variabel, yaitu persepsi korupsi dengan lima dimensi: pengetahuan, perilaku, refleksi, kontrol, dan sikap. Variabel kedua adalah gaya pengambilan keputusan dengan lima dimensi: rasional, intuitif, dependen, menghindari, dan spontan. Variabel terakhir adalah kolektivisme. Analisis data menggunakan regresi dengan pemodelan mediasi untuk melihat apakah variabel mediator mampu menjelaskan pengaruh antara variabel independen dengan dependen. Harapannya adalah variabel mediator mampu memperkuat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Creswell, 2012).

Sebaran Partisipan Penelitian

Pemilihan partisipan menggunakan teknik *simple random sampling*. Teknik ini sesuai dengan kebutuhan penelitian yaitu partisipan berasal dari populasi yang karakteristiknya sama. Sehingga anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi partisipan. Sehingga, partisipan mampu merepresentasikan keadaan populasi. (Creswell, 2012). Partisipan penelitian adalah masyarakat umum, dengan total 120 partisipan sukarelawan yang menyelesaikan survei secara *online* (N (Laki-laki) = 55, N (perempuan) = 65, M = 25.8, SD = 6.16). Survei berisi 51 pertanyaan untuk mengukur ketiga variabel. Partisipan tersebar pada beberapa tingkat pendidikan terakhir, SMA (N = 41), D3 (N = 2), D4/S1 (N = 68), dan S2 (N = 4). Selain itu, partisipan juga tersebar pada pengetahuannya tentang salah satu pelaku korupsi di Indonesia (Ya (N = 58); Tidak (N = 62)).

Tabel 1
Distribusi Partisipan (n = 120)

Kategori		Jumlah (N)	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	55	46
	Perempuan	65	54
Usia	< 21	13	11
	21 - 45	104	86
	> 45	3	2
Pengetahuan	Iya	58	48
	Tidak	62	52

Pada tabel 2, variabel kolektif memiliki skor rata-rata yaitu 5.47 (SD = 1.05; M pr = 5.53 (1.07); M lk = 5.40 (1.03)). Pada variabel gaya dalam mengambil keputusan, dimensi rasional memiliki rata-rata yaitu 4.41 (SD = 0.34; M pr = 4.41 (0.32); M lk = 4.40 (0.37)). Dimensi intuitif memiliki rata-rata sebesar 4.11 (SD = 0.55; M pr = 4.13 (0.57); M lk = 4.08 (0.53)). Rata-rata skor pada dimensi dependen adalah 4.96 (SD = 0.58; M pr = 4.10 (0.57); M lk = 4.01 (0.59)). Dimensi *avoidant* memiliki rata-rata yaitu 3.39 (SD = 0.72; M pr = 3.51 (0.70); M lk = 3.26 (0.72)). Terakhir, dimensi spontan memiliki rata-rata skor yaitu 3.12 (SD = 0.91; M pr = 3.27; M lk = 2.94 (0.93)).

Tabel 2
Each domain of variables: Mean and standar deviation for Gender (n = 120)

Variabel	Gender					
	Overall		Women		Men	
	M	SD	M	SD	M	SD
Collective	5.47	1.05	5.53	1.07	5.40	1.03
Dec. Making						
Rasional	4.41	0.34	4.41	0.32	4.40	0.37
Intuitif	4.11	0.55	4.13	0.57	4.08	0.52
Dependen	4.06	0.58	4.10	0.57	4.01	0.59
Avoidant	3.39	0.72	3.51	0.70	3.26	0.72
Spontan	3.12	0.91	3.27	0.87	2.94	0.93
Corruption perception	4.14	0.53	4.15	0.57	4.12	0.48
Knowledge	2.69	1.04	2.91	1.07	3.01	1.01
Behavior	3.73	0.63	3.73	0.63	3.72	0.62
Reflex	3.32	1.32	3.44	1.29	3.18	1.34
Control	4.28	0.56	4.31	0.53	4.23	0.60
Attitude						

Dimensi *knowledge* pada variabel persepsi korupsi memiliki rata-rata skor yaitu 4.14 (SD = 0.53; M pr = 4.15 (0.57); M lk = 4.12 (0.48)). Dimensi *behavior* memiliki rata-rata yaitu 2.69 (SD = 0.53; M pr = 2.91 (0.57); M lk = 3.01 (1.01)). Dimensi *reflex* memiliki skor rata-rata yaitu 3.73 (SD = 0.63; M pr = 3.73 (0.63); M lk = 3.72 (0.62)). Dimensi *control* memiliki rata-rata yaitu 3.32 (SD = 1.32; M pr = 3.44 (1.29); M lk = 3.18 (1.34)). Dimensi terakhir adalah *attitude* dengan rata-rata skor yaitu 4.28 (SD = 0.56; M pr = 4.31 (0.53); M lk = 4.23 (0.60)).

Instrumen kolektif diambil melalui translasi skala CVS dari Yoo (2016). Seluruh aitem dalam instrumen diukur dengan 7 poin skala likert, dari rentang 1 (sangat tidak setuju) sampai 7 (sangat setuju). Instrumen ini tidak memiliki dimensi dan tidak ada aitem yang *reverse*. Contoh item pada skala CVS adalah "Seseorang seharusnya tetap bersama dengan kelompoknya meskipun melalui kesulitan" ($\alpha = .85$).

Variabel gaya pengambilan keputusan didapatkan dan diterjemahkan dari instrumen GDMS oleh Baiocco, dkk (2009). Instrumen

memiliki 25 aitem tanpa ada *reverse*. Instrumen diukur dengan 5 poin skala likert, dari rentang 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju). Contoh aitem pada instrumen ini adalah "Ketika saya mengambil keputusan, penting bagi saya untuk merasa bahwa keputusan yang itu benar" ($\alpha = .79$).

Variabel dependen pada penelitian ini menggunakan instrumen dari CPS oleh Vieira, dkk (2022). Dari 36 aitem keseluruhan, hanya 20 aitem yang reliabel untuk diuji. CPS memiliki 5 dimensi dengan masing-masing memiliki empat item. Instrumen ini diukur dengan 5 poin skala likert, dari rentang 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju). Contoh item adalah "Setiap orang yang mengetahui adanya tindakan pidana korupsi wajib untuk melaporkannya" ($\alpha = .79$). Seluruh variabel dianalisis mediasi, termasuk masing-masing aspeknya menggunakan perangkat lunak R studio.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian dan analisis metode di atas, berikut beberapa hasil dan pembahasan yang dapat peneliti jelaskan.

Pengetahuan Partisipan akan Korupsi dan Psychological Pathways of Fraud

Penelitian ini diikuti oleh 120 partisipan sukarelawan yang menyelesaikan survei secara *online* yang sebarannya bisa dilihat pada **Tabel 1**. Selain sebaran partisipan tersebut, peneliti juga menambahkan beberapa pertanyaan baru tentang apakah partisipan pernah mengikuti seminar anti-korupsi, pernah menjadi saksi aksi korupsi, pernah melakukan korupsi, dan apakah partisipan mengetahui salah satu tindak pidana korupsi. Berikut temuan yang didapat:

Berdasarkan temuan di atas, terlihat bahwa kebanyakan partisipan sudah memiliki pengetahuan tentang pemberantasan korupsi (Ya: 80,8%) dan pernah menjadi saksi atas tindakan korupsi di lingkup teman kerja atau perilaku (Ya: 70,4%). Sedangkan di sisi lain, terdapat selisih yang kecil terhadap pernah atau tidak melakukan korupsi (Ya: 47,2%; Tidak: 52,8%) dan apakah partisipan mengenali salah satu sosok tersangka korupsi di Indonesia (Ya: 45,6%; Tidak: 54,4%).

Tabel 3.
Pertanyaan Pengetahuan Partisipan

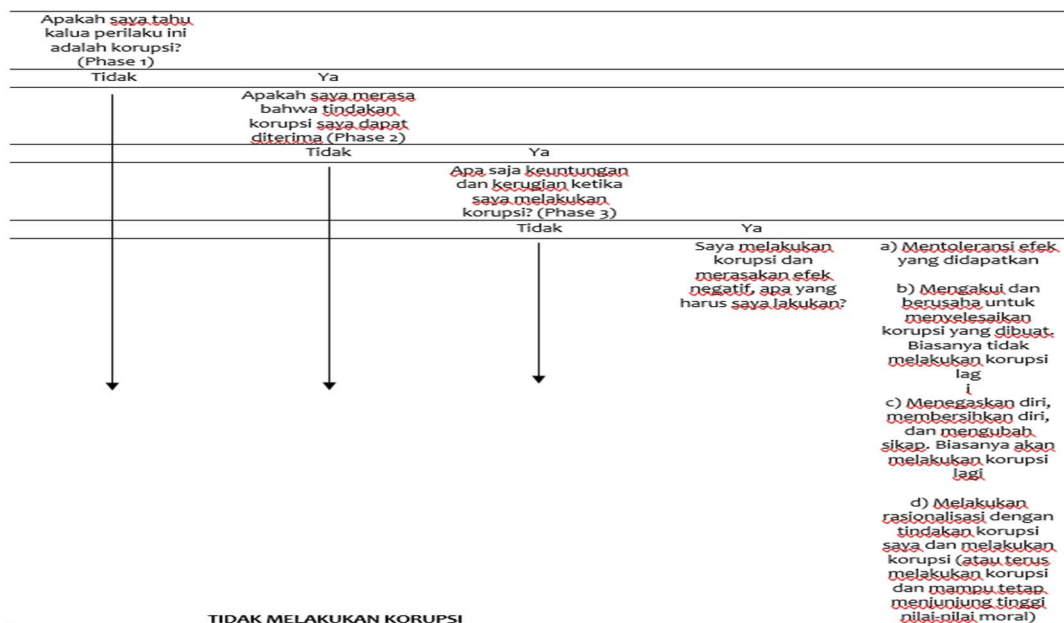
Pertanyaan	Ya (%)	Tidak (%)
Apakah Anda pernah mengikuti seminar atau pelatihan terkait dengan pemberantasan korupsi?	80.8	19.2
Apakah Anda pernah menjadi saksi atas keterlibatan teman kerja atau keluarga pada perilaku korupsi?	70.4	29.6
Apakah Anda pernah melakukan perilaku korupsi? (<i>korupsi dalam lingkup keluarga, teman bermain, dan/atau lingkungan pekerjaan</i>)	47.2	52.8
Apakah Anda mengenal sosok tersebut? (<i>diberikan foto salah satu tersangka korupsi di Indonesia</i>)	45.6	54.4

Pada teori *Psychological Pathways of Fraud* di atas, dijelaskan bawah salah elemen teorinya adalah kesadaran terhadap kecurangan/korupsi (Murphy & Dacin, 2011). Berdasarkan temuan di atas, dapat ditemui bahwa sebenarnya mayoritas dari partisipan sudah memiliki pengetahuan pendidikan anti-korupsi dan bahkan menjadi saksi dari tindakan korupsi di lingkungan sekitar mereka. Namun, meski begitu 42,7% partisipan

mengakui bahwa pernah melakukan tindakan korupsi di lingkungan keluarga, pertemanan atau pekerjaan. Bagaimana ini bisa terjadi?

Dalam teori *Psychological Pathways of Fraud* terdapat empat tahapan ketika seseorang memutuskan untuk melakukan kecurangan atau dalam konteks kali ini, korupsi (Murphy & Dacin, 2011):

Tabel 4.
Psychological Pathways of Fraud Theory



Berdasarkan skema teori di atas peneliti beranggapan bahwa proses korupsi di Indonesia banyak berkuat pada tahap kedua atau pertanyaan kedua yaitu, *apakah saya merasa tindakan korupsi saya dapat diterima?*

Dasar dari argumen ini berasal dari beberapa penelitian terdahulu yang menyingkap karakteristik korupsi di Indonesia yang serba kolektif (Sahama, Shofia, Reiza, & Riyono, 2019; Salama, 2014). Bukan hanya itu saja, kemampuan berpikir secara rasional juga sangat memengaruhi keputusan tindakan korupsi. Oleh karena itu, untuk melihat lebih jelas antara

korelasi ketiga variabel yang telah disampaikan di atas, berikut penjelasan lebih lanjutnya.

Aspek Demografis dan Persepsi Korupsi

Variabel kolektif berkorelasi dengan variabel gaya pengambilan keputusan ($r^2 = 0.28$, $t(1,118) = 6.923$, CI [0.39, 0.65], $p < 0.000$) (Tabel 5). Begitu pula dengan variabel persepsi korupsi, variabel kolektif memiliki korelasi signifikan ($r^2 = 0.28$, $t(1,118) = 6.882$, CI [0.39, 0.65], $p < 0.000$). Pada variabel mediator, gaya pengambilan keputusan juga memiliki korelasi dengan variabel persepsi korupsi ($r^2 = 0.42$, $t(1,118) = 9.227$, CI [0.52, 0.74], $p < 0.000$). Dengan hasil korelasi setiap

variabelnya, analisis memungkinkan dilanjutkan pada tahap regresi dan mediasi.

Tabel 5
Correlation Matrix Among Demographics and Study Variabels (n = 118)

	M	Usia	Gender	Pendidikan	Pengetahuan	Y	X
M	-						
Usia	-0.249	-					
Gender	0.184	-0.149	-				
Pendidikan	-0.286	0.428	-0.136	-			
Pengetahuan	0.065	0.125	-0.062	0.127	-		
Y	0.647	-0.125	0.056	-0.200	0.167	-	
X	0.537	-0.300	0.064	-0.144	-0.039	0.535	-

Note. M = mediator; Y = variabel dependen; X = variabel independen

Pada analisis regresi linear berganda, ditemukan bahwa variabel kolektif mampu memprediksi persepsi korupsi dengan memiliki estimasi skor 0.15 ($p < 0.000$, VIF = 1.352). Begitu pula variabel mediator yaitu gaya pengambilan keputusan yang memiliki estimasi 0.63 ($p < 0.000$, VIF = 1.032). Selain variabel yang dihasilkan dari hipotesis, salah satu pertanyaan terkait apakah partisipan mengenal salah satu pelaku korupsi di Indonesia juga mampu memprediksi secara signifikan persepsi korupsi dengan estimasi sebesar 0.152 ($p = 0.03$, VIF = 1.556). Sementara, variabel demografis partisipan lainnya (usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan) tidak mampu memprediksi variabel dependen. Bagaimanapun, aspek lain yang mungkin mampu menjelaskan apakah variabel demografis terhadap persepsi korupsi jika melihat relasi antara pelaku korupsi dengan individu itu sendiri. Relasi sosial terkadang membentuk motif yang terinternalisasi dalam persepsi masyarakat itu sendiri (Mulya, Saragih, Permatalia., 2023).

Tabel 6
Multiple linear regression analysis predicting corruption (n = 113)

Var	β	SE β	t	VIF	p
Collective	0.150	0.422	3.697	1.352	0.000
Dec. Making	0.638	0.040	5.815	1.032	0.000
Age	0.008	0.006	1.275	1.294	0.204
Gender	-0.042	0.072	-0.584	1.087	0.560
Education	-0.046	0.042	-1.105	1.541	0.271
Knowledge	0.152	0.072	2.117	1.556	0.036

Note. $r^2 = 0.5008$, $p < 0.05$, F-Statistic = 18.89, Residual SE = 0.3851; SE = standard error; VIF < 0.8; signif. Code: 0 '****' 0.001 '***' 0.01 '**'

Beberapa tipe dalam gaya pengambilan keputusan individu berpengaruh signifikan terhadap korupsi, lebih spesifik lagi ketika gaya pengambilan keputusan menciptakan kondisi stres kepada individu yang menyebabkan kurangnya moralitas dan etika individu (Khan, 2023). Selain variabel yang dihasilkan dari hipotesis, salah satu pertanyaan terkait apakah partisipan mengenal salah satu pelaku korupsi di Indonesia juga mampu memprediksi secara signifikan persepsi korupsi dengan estimasi sebesar 0.152 ($p = 0.03$, VIF = 1.556). Sementara, variabel karakteristik partisipan

lainnya (usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan) tidak mampu memprediksi variabel dependen.

Kolektif, Pengambilan Keputusan, dan Persepsi Korupsi

Ketika dilakukan pengujian antar dua variabel, kolektif mampu memprediksi secara tunggal variabel persepsi korupsi ($\beta = 0.204$, F (1, 118) = 47.93, $p < 0.000$) (Tabel 7). Hasil ini didukung oleh teori aksi kolektif bahwa perilaku kolektivisme pada kelompok sosial dengan jumlah banyak mampu memprediksi meningkatnya perilaku korupsi karena masyarakat tidak memiliki inisiatif untuk menaggulangi perilaku korupsi (Marquette & Peiffer, 2015).

Tabel 7
Simple linear regression analysis between significant variabel (n = 118)

Mod	β	F	Multiple R-Squared	Adjusted R-Squared	t
Corruption ~ Collective	0.204***	47.93	0.288	0.282	6.923
Corruption ~ Dec. Making	0.853***	85.15	0.419	0.414	9.228
Corruption ~ Collective	1.410***	47.93	0.288	0.282	6.923

Note. df = 118; signif. Code: 0 '****' 0.001 '***' 0.01 '**'

Variabel mediator juga mampu memprediksi secara tunggal variabel persepsi korupsi ($\beta = 0.853$, F (1, 118) = 85.15, $p < 0.000$). Perilaku tidak etis, contohnya korupsi, terjadi dari proses pengambilan keputusan seseorang yang membutuhkan mekanisme pengambilan informasi dan efek moralitas secara kognitif (Manara, M. 2023). Variabel kolektif juga mampu memprediksi secara signifikan variabel gaya pengambilan keputusan ($\beta = 1.410$, F (1, 118) = 47.93, $p < 0.000$). Budaya ketimuran yang cenderung pada masyarakatnya yang kolektif, misalnya Hong Kong dimana bisa saja terjadi protes-protes yang bersifat normative berubah menjadi aksi kolektif yang penuh kekerasan. Sehingga, melihat berbagai macam anteseden munculnya perilaku buruk secara masif pada masyarakat kolektif (Chan, dkk., 2023).

Tabel 8

	Estimate	SE	t	Multiple R-squared	F	Adjusted R-squared
(Intercept)	0.425	0.341	1.248			
Collective	0.132**	0.040	3.294	0.468	51.55	0.459
Dec. Making	0.666***	0.105	6.330			

Note. $p < 0.05$, F -Statistic = 51.55, Residual SE = 0.3905; SE = standard error; signif. Code: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*'

Pada Tabel 8, variabel kolektif dan gaya pengambilan keputusan berkontribusi 45,9% pada variabel persepsi korupsi partisipan. Kontribusi kedua variabel memiliki peningkatan persentase masing-masing oleh variabel kolektif sebesar 17,1% dan gaya pengambilan keputusan sebesar 4,5% (Tabel 7) dengan skor simultan

yaitu 51,55. Pada kolom estimasi menjelaskan bahwa setiap peningkatan satu poin kolektif partisipan dan satu poin gaya pengambilan keputusan partisipan meningkatkan 0,798 poin persepsi korupsi.

Analisis Mediasi Gaya Pengambilan Keputusan Dalam Dua Model

Analisis mediasi dilakukan dua model, pertama adalah analisis dengan melakukan simulasi *bootstrapping* sebanyak 5.000 kali, dan model kedua adalah analisis mediasi dengan jumlah partisipan yang sudah ada (Tabel 9). Kedua model cenderung memiliki hasil skor yang mirip, terutama pada estimasi jalur hipotesis yang memiliki skor sama.

Tabel 9
Mediate analysis (n = 118)

	B				SE	CI		R-square	
	a	b	c	c'		lower	upper	dm	cor
Model 1	0,205	0.667	0.132	0.137	0.040	0.190	0.345	0.289	0.468
Model 2	0.205	0.667	0.132	0.137	0.029	0.193	0.345	0.289	0.468

Note. Model 1 = Bootstrapping 5000; c = direct, c' = indirect

Variabel kolektif mampu memprediksi secara langsung variabel persepsi korupsi dengan estimasi skor 0.132. Artinya, setiap penambahan skor variabel kolektif sebanyak satu poin, persepsi korupsi meningkat sebesar 0,132. Melalui mediator gaya pengambilan keputusan, variabel korupsi memiliki peningkatan estimasi skor sebesar 0.137. Dari analisis mediasi, Setiap penambahan satu poin pada variabel kolektif dan gaya pengambilan keputusan, maka persepsi korupsi meningkat sebesar 0,137. Hal ini didukung bahwa gaya pengambilan keputusan yang salah dapat membuat individu kesulitan dalam menganalisa dampak yang terjadi ketika melakukan korupsi, meskipun orang lain baru sadar melihat kesalahan pengambilan keputusan ini setelah terjadi (Palmer & Maher, 2006).

SIMPULAN

Studi ini menemukan bahwa (1) kolektivisme berkorelasi positif terhadap gaya pengambilan keputusan, (2) kolektivisme berkorelasi secara positif terhadap persepsi korupsi, (3) gaya pengambilan keputusan berkorelasi positif terhadap persepsi korupsi, (4) variabel demografis tidak berkorelasi terhadap persepsi korupsi, dan (5) Kolektivisme mampu memprediksi persepsi korupsi melalui gaya pengambilan keputusan secara parsial. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, Model ini menjelaskan 45,9% variabilitas dalam persepsi korupsi ($R^2 = 0.459$), yang menunjukkan bahwa faktor lain masih berkontribusi secara

signifikan terhadap pembentukan persepsi korupsi. Model mediasi meningkatkan prediksi menjadi 46,8%. Sehingga, masih banyak faktor yang mendorong praktik korupsi di Indonesia yang dapat dibahas pada penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, J., & Pane, M. M. (2014). Corruptive Tendencies, Conscientiousness and Collectivism. *Procedia - Social Behaviour Sciences*, 132-147.
- Baiocco, R., Laghi, F., & D'Alessio, M. (2009). Decision-making style among adolescents: Relationship with sensation seeking and locus of control. *Journal of Adolescence*, 963-976.
- Bicchieri, C., & Rovelli, C. (1994). *Evolution and Revolution: The Dynamics of Corruption*. Pittsburgh: CMU - PHIL - 57.
- Christian S. Chan, Robyn E. Gulliver, Arya Awale, Katy Y. Y. Tam, Winnifred R. Louis. (2023). The Influence of Perceived Threat and Political Mistrust on Politicized Identity and Normative and Violent Nonnormative Collective Action. *Journal of Social and Political Psychology*, 2023, Vol. 11(1), 126–144, <https://doi.org/10.5964/jspp.7979>
- Creswell, J.W. (2012). *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. Garamond by TecTech
- International, T. (2024). *Corruption Perceptions Index 2023*. Transparency International .
- Khan, A. (2023). Decision-Making Styles, Integrity and Perceived Stress in Police Offices. *Advanced Psychological Research*, 59-74.

- Liu, X. (2016). A Literature Review on the Definition of Corruption and Factors Affecting the Risk of Corruption. *Open Journal of Social Science*, 4.
- Manara, M. U. (2023). Thinking about Corrupt Thinking. *Maastricht University*, 149-154.
- Marquette, D., & Peiffer, D. (2015). *Corruption and Collective Action*. Birmingham: The Developmental Leadership Program (DLP).
- Mulya, Y. A., Djuwita, C. R., & Shalsabilla, H. N. (2022). Lady Killer Dalam Lingkungan Perkotaan: Sebuah Studi Fenomenologi. *Jurnal Psikologi Forensik Indonesia*, 114-126.
- Mulya, Y. A., Saragih, E. S., & Saragih, D. (2023). Perbedaan Karakteristik Korban Pembunuhan di Indonesia Tahun 2019 - 2023. *TEMU ILMIAH NASIONAL XII ASOSIASI PSIKOLOGI FORENSIK (APSIFOR)At: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang* (pp. 15-24). Malang: APSIFOR dan Fakultas Psikologi Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Murphy, P. R., & Dacin, M. T. (2011). Psychological Pathways to Fraud: Understanding and Preventing Fraud in Organizations. *Journal of Business Ethics*, 601-618.
- Palmer, D. A., & Maher, M. W. (2006). Developing the Process Model of Collective Corruption. *Journal of Management Unquiry*, 363-370.
- Prabowo, H. Y. (2014). To be Corrupt or Not to be Corrupt. *Journal of Money Laundering Control*, 306-326.
- Prabowo, H. Y., & Cooper, K. (2017). Re-understanding Corruption in the Indonesian Public Sector Through Three Behavioral Lenses. *Emerald Insight*, 1028-1062.
- Sahama, S., Shofia, A., Reiza, M., & Riyono, B. (2019). Corruption in Indonesia: An Investigation from Mental Helath, Sprituality, and Leadership Presepectives. *Malaysian Journal of Medicine and Health Science*, 45-53.
- Salama, N. (2014). Motif dan Proses Psikologis Korupsi. *Jurnal Psikologi*, 149 - 164.
- Scott, S. G., & Bruce, R. A. (1995). Decision-Making Styale: The Development and Assessment of a New Measure. *Educational and Psychological Measurement*, 818-831.
- Seleim, A., & Bontis, N. (2009). The Relationship between Culture and Corruption: A Cross-National Study. *Journal of Intellectual Capital*, 1469-1930.
- Shallahudin, M. S. (2022, September 19). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNAIR. Retrieved from Departemen Politik: <https://politik.fisip.unair.ac.id/perjalanan-pemberantasan-korupsi-di-setiap-era-kepresidenan-indonesia/>
- Statistik, B. P. (2024). *Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2024*. Badan Pusat Statistik.
- Thomas, E. F., & Louis, W. R. (2014). When will collective action be effective? Violent and non-violent protests differentially influence perceptions of legitimacy and efficacy among sympathizers. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 40(2), 263-276. <https://doi.org/10.1177/0146167213510525>
- Vieira, K. M., Visentini, M. S., & Cunha, R. T. (2022). Construction and Validation of a Corruption Perception Scale at the Citizen Level. *Cad. EBAPE.BR*, 452-469.
- Yoo, D., & Shin, D.-C. (2016). Invariant Effect of Individual Cultural Orientations: An Application of CVSCALE. *International Marketing Review*, 1-24.